
Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

Jamrawati Jusuf

Mahasiswa Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : zamrawati.jusuf@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan tahapan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MA Sabrun Jamil Botupingge, berikut faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi tersebut. Adapun permasalahan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada penelitian ini, difokuskan pada proses pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, staf pegawai, peserta didik, dan komite madrasah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini pendekatan multidisipliner, dengan menggunakan analisis data kualitatif meliputi tiga tahap; pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi standar pengelolaan pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MA Sabrun Jamil Botupingge sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa komponen pengelolaan yang belum terlaksana sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas; seperti pada pengelolaan bidang kesiswaan untuk aspek bimbingan dan konseling pada pengelolaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pengelolaan pembiayaan dan keuangan, pengelolaan humas dan kemitraan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa faktor penghambat seperti rendahnya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, perencanaan keuangan yang kurang matang; kebijakan pemerintah dan yayasan, proses atau alur pencairan dana yang tidak mudah, adanya program pendidikan gratis, program kerja humas, serta pengetahuan orang tua tentang madrasah yang minim. Rekomendasi penelitian, hendaknya meningkatkan peran seluruh warga madrasah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik dari alat pembelajaran, maupun sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah.

Kata kunci: *Standar Pengelolaan Pendidikan, Kualitas Pembelajaran.*

Pendahuluan

Standar adalah ukuran atau paramater yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu sebagai acuan baku dan/atau standar formal yang disepakati bersama. Hal ini menjadi penting untuk diketahui, sebagai upaya untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang, dan masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan hasil yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 bahwa: “Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”¹ Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumberdaya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Dengan cepatnya arus informasi dan teknologi komunikasi, maka pendidikan diharapkan akan mampu menyiapkan peserta didik yang akan mampu menjawab semua tantangan. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 2, bahwa pemerintah menentukan kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013. Adapun standar yang mengalami perubahan adalah tentang standar kelulusan, standar proses, standar isi dan standar penilaian sedangkan standar yang lain tetap dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Terkait dengan hal di atas, untuk menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas tidak terjadi begitu saja dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi memerlukan suatu upaya yang efektif dan efisien. Kualitas yang baik dalam suatu lembaga pendidikan, ditentukan oleh perencanaan yang baik dalam pengelolaan. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan yang baik dalam suatu lembaga pendidikan, agar menghasilkan *output* yang berkualitas, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nanang Fattah, bahwa untuk melaksanakan sesuatu dengan tertib, teratur, dan terarah diperlukan adanya pengelolaan. Pengelolaan merupakan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang.²

Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di semua lembaga pendidikan atau institusi yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Maksud efektif dan efisien adalah berhasil guna dan berdaya guna. Artinya, bahwa pengelolaan yang berhasil mencapai tujuan dengan penghematan tenaga, waktu dan biaya. Dalam sudut pandang manajemen mutu terpadu (*Total Quality management*), pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik, sebagai pusat perhatian dalam memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung, dan hasil akhir yang memuaskan dari proses pendidikan tersebut.³ Dengan demikian

¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 6.

²Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.

³Edwar Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), h. 86.

kualitas pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah kualitas pendidikan maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu; masukan, proses, dan lulusan. Keberadaan lulusan lembaga pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi subjek dan objek pembangunan yang perlu ditingkatkan kualitasnya melalui jalur pendidikan dalam fungsi, proses, dan aktifitasnya yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.⁴

Kenyataan yang dihadapi saat ini kualitas pendidikan dalam sistem persekolahan masih jauh dari harapan, umumnya belum menerapkan pembelajaran sampai peserta didik menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak menguasai materi pembelajaran meskipun sudah tamat dari sekolah/madrasah. Tidak heran kalau kualitas pendidikan secara nasional masih rendah. Dengan demikian proses pembelajaran lebih mengacu kepada bagaimana peserta didik belajar, dan bukan lagi pada apa yang dipelajari. Sesuai dengan cita-cita dari pendidikan nasional, Guru perlu memiliki beberapa prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampuan internal peserta didik, di dalam merancang strategi dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas.⁵

Fakta empirik terkait dengan kualitas pembelajaran yang ada saat ini, khususnya di Madrasah Aliyah diperhadapkan dengan berbagai permasalahan diantaranya, banyaknya madrasah yang dikelola oleh swasta (masyarakat). Dengan demikian, maju mundurnya madrasah akan sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Namun, ironisnya adalah masyarakat masih memberikan partisipasi setengah hati. Sarana, prasarana yang ada di madrasah masih kalah jauh dengan sekolah umum lainnya, sehingga saat ini masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, dimana salah satu tolak ukur kualitas dari pembelajaran dinilai dari hasil ujian nasional atau kelulusan. Lulusan madrasah jika dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat, umumnya masih berada di bawahnya. Meski ada beberapa madrasah mampu menempati kualitas lebih baik dari sekolah umum. Di samping itu, dalam masyarakat masih kuat pandangan bahwa pembelajaran di madrasah, hanya melulu diajarkan pendidikan agama, sedangkan sekolah umum jauh lebih luas yang diajarkan. Di satu sisi, hal ini memberikan nilai plus bagi madrasah dengan spesifikasi keagamaan, namun dilain pihak akan merugikan bagi madrasah itu sendiri, yang dipandang kurang mengikuti perubahan zaman dan perkembangan yang ada.

Agar standar pengelolaan pendidikan madrasah dapat berhasil maka memerlukan suatu konsep, perencanaan, dan organisasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, diperlukan adanya program-program yang nyata, terencana dan dapat dievaluasi untuk menghantar proses pembelajaran sampai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan.⁶ Pendidikan membutuhkan pengelolaan yang baik agar

⁴Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Jakarta:Grafindo,2012), h.2.

⁵Mulyono, *Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), h. 3.

⁶Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management Analisis Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2010), h. 817.

menghasilkan kualitas yang baik pula. Pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2007 terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 menegaskan bahwa standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam standar nasional pendidikan sebagaimana perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan No. 32 tahun 2013, untuk standar pengelolaan pendidikan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa standar pengelolaan pendidikan adalah perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan di seluruh tingkat satuan pendidikan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk di Madrasah Aliyah Swasta, yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Madrasah Aliyah Swasta yang tersebar di Bone Bolango yaitu Madrasah Aliyah Hubulo di Kecamatan Tapa, Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Kecamatan Kabila, Madrasah Aliyah Nurul Bahri di Kecamatan Biluango, Madrasah Aliyah Sabrun Jamil di Kecamatan Botupingge. Masing-masing Madrasah Aliyah swasta tersebut memiliki keunggulan yang sangat variatif, mulai dari yang maju dan berkualitas hingga pada madrasah yang memprihatinkan. Adapun Madrasah Aliyah Sabrun Jamil sebagai salah satu Madrasah Aliyah, mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya untuk bersaing dengan madrasah negeri dan sekolah umum lainnya. Sepanjang sejarahnya, madrasah ini telah melahirkan beberapa orang ulama/ustadz yang cukup berperan dalam masyarakat Islam Gorontalo. Yayasan Sabrun Jamil bertujuan untuk pendidikan dan dakwah Islamiyah. Pendirian yayasan ini didukung oleh ormas-ormas Islam yang ada di Gorontalo pada saat itu seperti; Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, PSII, dan ormas-ormas lainnya.⁷ Semua unit lembaga pendidikan inilah yang masih eksis hingga kini, dan ikut menunjang eksistensi Madrasah Aliyah Sabrun Jamil sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Gorontalo.

Untuk menjadikan Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dapat dilirik oleh masyarakat, perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang mencakup perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan rencana program pembelajaran, pengawasan dan evaluasi program pembelajaran. Oleh karena itu, seluruh warga Madrasah Aliyah Sabrun Jamil berusaha mengimplementasikan pengelolaan pendidikan sesuai standar pengelolaan pendidikan, agar sesuai dengan standar yang ditentukan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Berdasarkan landasan konseptual dan teoritik yang ada dan kenyataan empirik di atas, bahwa penerapan standar pengelolaan

⁷Tim Penyusun, *Direktori dan Data Pondok Pesantren Yayasan Sabrun Djamil* (Gorontalo: YPDI Sabrun Djamil; 2014), h. 1. Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.

pendidikan di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, belum maksimal dalam hal perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang belum maksimal. Untuk itulah, penulis tertarik melakukan penelitian dengan formulasi judul sebagai berikut: “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, secara umum akan membahas permasalahan pokok yaitu bagaimana implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, yang secara spesifik akan dititik beratkan pada aspek tahapan, proses, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja “*to implement*” yang artinya untuk melaksanakan. Secara sederhana implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Sehubungan dengan kata implementasi ini, Pressman dan Aaron Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish fulfill, produce, complete*” maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas, yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat), untuk memperoleh hasil.⁸ Van Meter Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: “*those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions*. Artinya: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta, yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan, tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.⁹

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Pendekatan kedua, implementasi dilihat sebagai suatu bidang kajian (*field of study*). Implementasi sebagai suatu studi memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter* (ontologi), cara memahami objek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).¹⁰ Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya

⁸Purwanto & Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 17.

⁹*Ibid.*, h. 20.

¹⁰*Ibid.*, h. 21-23.

tujuan atau sasaran, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan. Adapun istilah pengelolaan sendiri, oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola”. Kata pengelolaan juga berasal dari kata manajemen. Istilah manajemen merupakan istilah ekuivokal, yakni kata yang memiliki arti banyak dan sejarah panjang, walau secara esensial memuat unsur sama. Keanekaragaman arti manajemen ini cenderung dikarenakan perbedaan disiplin ilmu, paradigma, perspektif (cara pandang), latar pengalaman dan latar kultural yang berbeda. Manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris *manage* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari pengertian ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan.¹¹ Dalam bahasa latin *manus*, yang berarti; memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing.¹² Apabila pengertian tersebut diterapkan dalam pendidikan, maka pengertiannya menjadi mengelola pendidikan. Sejalan dengan pengertian ini, Giffin mengartikan manajemen merupakan sekumpulan aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan) yang dilakukan pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi) dengan maksud mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹³ Begitu pentingnya peran manajemen sehingga kita dapat melihat bahwa manajemen dikenal sudah cukup lama bahkan telah diterapkan pada zaman kenabian terdahulu. Contohnya manajemen pada zaman Nabi Yusuf. Beliau merupakan seorang manajer yang sangat handal, selain sebagai seorang Nabi beliau memiliki dua sifat yang patut dicontohi oleh seorang manajer, hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surah Yusuf : 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”¹⁴

Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para manajer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses pengelolaan pendidikan yaitu dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90:

¹¹Kadarman, A.M, & Udaya, Yusuf, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Prenhallindo,2008), h.6.

¹²Rosady Ruslan, *Manajemen Humas Dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1.

¹³Ricky, W. Giffin. *Managemen*. (Delhi: AITBS Publisher & Distributors, 2010), h.5.

¹⁴Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: Asy-Syifa, 1996), h.14.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعُظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁵

Ayat-ayat lain yang berkesinambungan dengan pengelolaan adalah dalam (al-Qur'an 75: 36) bahwa "apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung jawaban?, dan selanjutnya (al-Qur'an 17:36) sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.¹⁶

Ayat tersebut di atas merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam pengelolaan pendidikan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula, intisari ayat tersebut merupakan suatu "pembeda" antara pengelolaan secara umum, dengan pengelolaan dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai.

Pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi-kan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Segala sesuatu perlu adanya pengelolaan, agar bisa tercapai hasil yang optimal.¹⁷ Pendapat di atas menggambarkan bahwa pengelolaan dengan segenap sub sistemnya dinilai merupakan hal yang sangat penting untuk keteraturan, ketertiban, dan keberhasilan sebuah proses pekerjaan apapun. Dalam Islam, memperkenalkan prinsip dasar (*mabdau assasiey*) organisasi, perencanaan (*at takhthieth*), konsep sistem *hisba al-itqan* (kontrol kualitas).

¹⁵Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: Asy-Syifa, 1996), h.21.

¹⁶Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: Asy-Syifa, 1996), h.25.

¹⁷Sobri, Asep Jihad & Charul Rochman, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), h. 1-2.

Pengelolaan pendidikan di madrasah tidak jauh berbeda dengan sekolah. Madrasah secara harfiah berarti atau setara maknanya dengan kata sekolah. Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (*zharaf makan*) dan akar kata “*darasa*”. Secara harfiah atau pengertian menurut etimologi “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”, dan akar kata “*darasa*” juga bisa diturunkan kata “*midras*” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”; kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab”¹⁸. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah madrasah, yang merupakan terjemahan dan kata *school*.¹⁸

Kata “madrasah” juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu “*darasa*”, yang berarti “membaca dan belajar” atau “tempat duduk untuk belajar”. Dan kedua bahasa tersebut, kata “madrasah” mempunyai arti yang sama: “tempat belajar”. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata “madrasah” memiliki arti “madrasah”. Madrasah, dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dan kata *school*. Kata madrasah adalah termasuk kata serapan dan bahasa asing. Kata itu berasal dari kata *schole* (Yunani) *schole* (Latin), *school* (Inggris), *school* (Belanda), dan *schule* (Jerman). *Schole* (Yunani) berarti bebas dari pekerjaan dalam masyarakat yang masih mengenal perbudakan, golongan merdeka yang bebas dan pekerjaan ini mengisi waktunya dengan berdiskusi, mendengarkan ceramah dan membaca karya-karya ilmiah atau filsafat.¹⁹ Di Indonesia, madrasah digunakan untuk suatu lembaga pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Madrasah (baca madrasah) sebagai suatu sistem memiliki banyak karakteristik umum sebagaimana organisasi lainnya yang berskala luas, dua di antara karakteristik itu ialah pertama; sistem permadrasahan mempunyai tujuan. Kedua; tugas sistem permadrasahan ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, dan karena itulah para guru atau pendidik dipekerjakan.²⁰ Kendati pada mulanya kata “madrasah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.²¹

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.²² Perencanaan program satuan pendidikan meliputi perumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah. Visi sekolah adalah rumusan yang berisi cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi sekolah adalah pernyataan yang berkaitan dengan program sekolah untuk

¹⁸Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.66.

¹⁹Said, H.M, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Alumni, 1995), h.154.

²⁰Sanapiah, Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), h.66-67.

²¹Malik, Fadjat, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1996), h.111.

²²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 5.

mewujudkan visi sekolah dalam kurun waktu tertentu. Tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan), dan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan Pemerintah. Rencana kerja sekolah terdiri atas rencana kerja jangka menengah (4 tahunan) dan rencana kerja tahunan.²³ Pelaksanaan rencana kerja mencakup pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.²⁴

Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan. Sedangkan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Evaluasi dalam standar pengelolaan meliputi evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Akreditasi Sekolah.²⁵ Kepemimpinan sekolah yang dimaksudkan adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepala dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan.²⁶

Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional, adalah alternatif model manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Dengan MBS sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional. Titik temu antara Standar Pengelolaan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah adalah meliputi tiga hal, yaitu: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, yang masing-masing memiliki indikator-indikator tertentu.

²³Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 5-8.

²⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, h. 9.

²⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 31.

²⁶Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 35.

Kualitas Pembelajaran

Kualitas secara umum berhubungan erat dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, terhadap pelayanan yang didapatkan. Ariani mengartikan kualitas sebagai suatu proses perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement process*) yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi dan tujuan kinerja. Dukungan manajemen untuk perbaikan kualitas adalah penting bagi kemampuan berkompetisi secara efektif. Perbaikan kualitas lebih dari suatu strategi usaha, melainkan merupakan suatu tanggung jawab pribadi, sebagai bagian dari kegiatan usaha. Komitmen terhadap kualitas adalah suatu sikap yang diformulasikan dan didemonstrasikan dalam setiap lingkup kegiatan, serta mempunyai karakteristik hubungan yang paling dekat, dengan masyarakat sebagai konsumen.²⁷

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif istilah mutu adalah proses yang terstruktur, yang membantu orang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki proses pendidikan. Sehingga perbaikan mutu kerja harus dilaksanakan secara konsisten. Efektivitas dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai hasil guna atau pencapaian tujuan sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Kaitannya dengan pembelajaran, Mulyasa mengemukakan efektivitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan proses *input-proses-output* pembelajaran, tidak hanya *output* atau hasil, namun harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan berdasarkan dimensi waktu efektivitas dapat diamati dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.²⁸ Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok mengajar guru, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari para peserta didik. Hubungannya dengan penelitian ini adalah diartikan bagaimana implemmentasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan berimplikasi pada pencapaian tujuan yang diharapkan.

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar, dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran tersebut. Mulyasa mengemukakan bahwa hasil proses belajar dikatakan berhasil dan berkualitas, apabila seluruhnya atau setidaknya-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan gairah belajar yang tinggi.²⁹ Peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas

²⁷Wahyu Dorothea Ariani, *Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 9.

²⁸Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 83.

²⁹Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18. Mulyasa, *op.cit.*, h. 74.

kemampuan orang itu dalam berbagai bidang. Jika dalam pembelajaran tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuannya, maka orang tersebut mengalami kegagalan dalam proses belajar. Guru memiliki peran penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan.

Setiap guru yang berkarya pada suatu lembaga pendidikan selalu terkait pada ruang, tempat, dan waktu. Oleh karena itu pada jam kerja harus selalu berada di sekolah. Rasa bangga memiliki profesi sebagai guru, dan rasa cinta terhadap tugas hendaknya tertanam dalam jiwa guru, sehingga ada keinginan untuk terus belajar agar dapat meningkatkan diri baik dalam pengetahuan, wawasan maupun keterampilan mengajar. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 1, dikemukakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.³⁰

Kualitas secara umum mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Kualitas memiliki elemen-elemen sebagai berikut: *Pertama*, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. *Kedua*, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. *Ketiga*, merupakan kondisi yang selalu berubah.³¹ Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mengacu pada masukan, proses, luaran, dan *outcome*. Kualitas masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi (penjaga sekolah), dan peserta didik. *Kedua*, memenuhi atau tidak kriteria masukan material berupa media, buku-buku, kurikulum, prasarana/sarana sekolah, dan lain-lain. *Ketiga*, memenuhi atau tidak kriteria masukan berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. *Keempat*, kualitas masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, misi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.³² Hasil pendidikan dipandang bermutu atau berkualitas jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan non akademik pada peserta didik yang dinyatakan lulus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan non akademik dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh peserta didik, selama mengikuti program sekolah termasuk nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan nilai lainnya yang diperoleh selama menjalani pendidikan di madrasah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

³⁰Martinis Yamin, *op. cit.*, h. 2.

³¹I. Abu Duhou, *School Based Management*, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, (terj.), 1999, h. 48.

³²Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 32.

³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 82.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan filosofis, sosiologis dan psikologis.³⁴ Penulis menetapkan lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Sabrun Djamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 3 komponen sumber data, yaitu orang (*person*), tempat/kejadian (*place*), dokumen atau data-data tertulis (*paper*).³⁵ Sementara prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik: Observasi/ Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Penulis juga dalam melakukan analisis data dilakukan melalui proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan pengumpulan materi-materi lain yang dipandang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.³⁶

Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

Implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, dibatasi pada pelaksanaan program yaitu: (a) pengelolaan bidang kesiswaan, (b) pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (c) pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, (d) pengelolaan bidang sarana dan prasarana, (e) pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, (f) pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah/madrasah, (g) pengelolaan bidang humas dan kemitraan. Berdasarkan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, diperoleh gambaran sebagai berikut; *Pertama*, pengelolaan bidang peserta didik terlaksana sesuai dengan indikator yang ditetapkan, meskipun perlu untuk dirumuskan perencanaan program yang meliputi kegiatan selama pembelajaran dan di luar jam pelajaran. *Kedua*, pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang terlaksana, terdiri dari penyusunan dokumen KTSP, kalender pendidikan, pelaksanaan program pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pengelolaan hasil belajar siswa, serta memiliki peraturan akademik yang mengatur kegiatan pembelajaran dan ketentuan penggunaan sarana prasarana belajar sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Ketiga, pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan yang terlaksana meliputi pembagian tugas kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan, meskipun pelaksanaan tugas belum secara spesifik dijelaskan pada pembagian tugas. *Keempat*, pengelolaan bidang sarana dan prasarana yang terlaksana terdiri dari penyusunan program sarana dan prasarana dan pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu sumber

³⁴Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), h. 12.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 23.

³⁶Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 85.

belajar. *Kelima*, pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan yang terlaksana adalah aspek penyusunan pedoman pengelolaan pembiayaan dan keuangan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawaban pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, telah dilakukan berdasarkan anggaran yang ada. *Keenam*, pengelolaan bidang budaya dan lingkungan yang terlaksana terdiri dari upaya madrasah dalam menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif, penyusunan tata tertib, kode etik, serta program kesadaran beretika di madrasah. *Ketujuh*, pengelolaan bidang humas dan kemitraan difokuskan pada kerjasama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan madrasah, melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menunjang kualitas pembelajaran, dengan melibatkan masyarakat pada beberapa kegiatan madrasah. Kualitas pembelajaran menjadi sebuah keniscayaan apabila dilaksanakan sesuai dengan standard pengelolaan pendidikan, sehingga Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di Madrasah tersebut.

Tahapan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MA Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

Untuk menganalisis tahapan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, penulis melakukan pengamatan dan penelusuran dokumen pada Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambatnya sebagai upaya rekonstruksi meningkatkan kualitas pembelajaran agar sesuai dengan standar pengelolaan. Berdasarkan upaya tersebut ditemukan tahapan implementasi standar pengelolaan pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge. Hal ini penulis deskripsikan melalui tiga tahapan besar, yaitu; tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, dan tahap evaluasi pembelajaran.

1. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan temuan penelitian terkait perencanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge diperoleh gambaran bahwa para guru disetiap awal tahun pelajaran yakni menyusun silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), program semester dan program tahunan, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun proses penyusunan kurikulum dilakukan melalui *workshop*, berpedoman pada kurikulum nasional yaitu saat ini masih menggunakan KTSP. Pihak madrasah melibatkan seluruh guru dan staf, agar seluruh pihak merasa mempunyai tanggungjawab terhadap perkembangan kurikulum yang akan dilakukan selanjutnya, dengan melakukan analisis terlebih dahulu mengenai kebutuhan lingkungan madrasah, dengan menggunakan skala prioritas. Kemudian juga melihat kesanggupan peserta didik dalam menerima dan menjalani proses pelajaran. Disamping itu, sebelum guru membuat perangkat kurikulum pihak madrasah mengadakan *workshop* yang biasanya diadakan akhir tahun ajaran, di forum *workshop* inilah para guru mendapatkan wawasan, terkait pembuatan perangkat kurikulum mulai dari pembuatan prota, promes, sampai pembuatan KKM. Hasil

penyusunan kurikulum ini, kemudian diimplementasikan sebagai acuan proses pembelajaran di kelas.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan temuan penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, diperoleh gambaran bahwa sebagaimana guru dalam melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada silabus dan RPP yang sudah disusun. Dalam pelaksanaan kurikulum di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, dilaksanakan dengan memasukkan pelajaran pesantren pada kurikulum yang diterapkan di madrasah. Hal itu tampak sekali terutama pada kurikulum Pelajaran Agama Islam (PAI) dan kurikulum Muatan Lokal. Pada kurikulum PAI Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge dalam pelaksanaannya meskipun mengikuti ketetapan pemerintah, namun pengembangannya pada kemampuan Bahasa Arab, serta kajian kitab yang diajarkan menggunakan bahasa Arab, sehingga ciri khas pesantren selalu melekat pada pembelajaran di madrasah ini. Lain halnya dengan kurikulum muatan lokal yang semuanya adalah berupa pelajaran yang biasanya diajarkan di pesantren, yang meliputi: *nahwu, saraf, Aswaja, Ilmu Faroid, Balagh, dan Usul Fiqih*.

Penelitian ini juga menemukan kenyataan, bahwa Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran diperoleh gambaran bahwa kurikulum yang diterapkannya memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu saat ini masih menggunakan KTSP dengan melibatkan seluruh warga madrasah dalam penyusunannya. Dimana wakil kepala madrasah bidang kurikulum terlibat mengatur penyusunan program pengajaran (program semester, program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran sesuai kurikulum) mengadakan perbaikan-perbaikan program kerja kegiatan mengenai teknis administrasi, maupun teknis edukatif serta mengadakan pendekatan kepada semua guru mata pelajaran, dan wali kelas agar tugas-tugas yang dibebankan dilaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Sementara guru bertugas menyusun dan merumuskan tujuan, yang tepat memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan peserta didik, memilih metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun metode dan alat penilaian yang tepat.

3. Evaluasi Pembelajaran

Proses evaluasi pembelajaran berkaitan erat dengan standar pengelolaan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Tilar, yang menyatakan bahwa permasalahan pendidikan nasional dewasa ini, dipengaruhi adalah sumber daya guru yang belum profesional. Adapun faktor yang menghambat perkembangan madrasah selama ini, ialah keterbatasan tenaga guru, ketidakjelasan status guru, dan ketidaklayakan kualifikasi guru.³⁷ Sedangkan dari temuan data yang penulis dapatkan dari Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, menyebutkan bahwa fenomena yang

³⁷H.A.R Tilar. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Indonesia Tera, 2009), h. 30.

melatarbelakangi permasalahan pengelolaan bidang tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Aliyah ini, umumnya adalah kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan, disamping itu juga masih kurangnya tenaga guru yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang dibelajarkan. Sehingga menurut peneliti dapat mengakibatkan masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, temuan ini juga merupakan permasalahan nasionalnya yang umumnya dihadapi oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pengelolaan bidang tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, yaitu perlu adanya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan peningkatan kualitas melalui studi lanjut. Dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran ini, juga perlu adanya kesamaan pandangan dan langkah antara Kemendiknas dan Kemenag, kepada guru yang ada di Madrasah Aliyah, dan guru yang ada di Sekolah Menengah Atas, supaya saling bersinergi agar kualitas guru dapat ditingkatkan, yang pada muaranya dapat meningkatkan mutu lulusan lembaga pendidikan.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, maka rekonstruksi meningkatkan kualitas pembelajaran yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah pada pengelolaan bidang sarana prasarana yaitu: *Pertama*, usaha meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan ditekankan dalam segi pengadaan karena sarana yang dibutuhkan sangat banyak, dan tidak bisa semuanya langsung diberikan oleh pemerintah dananya maupun yayasan. Oleh karena itu pengalokasian dana sebisa mungkin diperuntukkan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. *Kedua*, perlu mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan pengarahan dalam kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, agar dalam kegiatannya berjalan dengan baik dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. *Ketiga*, guru dapat lebih berkompoten dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan, untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas dan kerjasama dengan pihak sarana dan prasarana madrasah untuk memperlancar pengelolaan sarana dan prasarana di madrasah.

Berdasarkan temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara bersama kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat madrasah dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, karena sumber dana utamanya tergantung dari kebijakan pemerintah, dimana madrasah tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan, tergantung pada kebijakan pemerintah. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nanang Fattah, bahwa dalam pembiayaan pendidikan ada semacam tarik ulur antara peningkatan kualitas dengan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah akan sangat memerlukan pemikiran yang mendalam untuk menemukan jalan keluar yang akan ditempuh sebagai wujud usaha peningkatan mutu pendidikan melalui sokongan dana, karena peningkatan mutu pendidikan harus melalui peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas, dan proses pembelajaran di kelas akan bermutu, jika ada pembiayaan tinggi yang terorganisir. Perhitungan alokasi biaya pendidikan (pembiayaan pendidikan) harus dilakukan seakurat mungkin sesuai

dengan komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan, apabila sudah dilakukan maka menganalisis semua penggunaan biaya pendidikan menjadi langkah yang tidak bisa ditinggalkan.³⁸

Terkait dengan pengelolaan bidang budaya dan lingkungan madrasah, di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, hasil penelitian menunjukkan Madrasah aliyah memiliki bermacam-macam budaya seperti budaya fisik dan budaya perilaku. Budaya fisik dapat dilihat dari tampilan fisik Madrasah Aliyah. Sedangkan budaya perilaku dapat dilihat dari budaya religi, budaya kedisiplinan dan pelaksanaan tata tertib, budaya berprestasi dan berkompetisi, budaya gemar membaca dan budaya bersih. Elemen budaya sekolah berupa fisik dapat dilihat dari perlengkapan sarana dan prasarana, gedung sekolah yang dilengkapi dengan pagar, semboyan, atau tulisan-tulisan yang dipajang di tempat-tempat strategis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peserta didik pada Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge sudah banyak mengukir prestasi dan menjadi juara dalam berbagai lomba di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah piala yang dipajang di depan ruang kantor.

Proses peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pihak madrasah harus dilakukan secara seimbang, dengan melakukan perubahan melalui kegiatan budaya membaca, serta manajemen perawatan untuk keberlangsungan semua kegiatan yang ada di madrasah. Madrasah hendaknya meningkatkan peran aktif seluruh warga madrasa, dengan menghimbau seluruh warga madrasah untuk mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah di sediakan di sekolah, baik dari alat pembelajaran maupun sarana prasarana untuk mendukung budaya yang ada di madrasah. Dari temuan permasalahan tersebut di atas, maka rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah pada pengelolaan bidang humas dan kemitraan yaitu; *Pertama*, memanfaatkan kelengkapan sarana dan prasarana madrasah untuk media pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. *Kedua*, mengadakan kerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat, seperti bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh, pejabat pemerintahan, media percetakan, stasiun radio, dan sebagainya, untuk memperkenalkan madrasah. *Ketiga*, memanfaatkan ekstra kurikuler seperti *marching band*, pramuka, PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional), PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) atau even-even lainnya untuk semakin mempopulerkan madrasah pada masyarakat. *Keempat*, memajukan keunggulan yang sudah dimiliki madrasah, seperti kurikulum agama, ekstra kurikuler dan memanfaatkan kelengkapan sarana dan prasarana dengan baik. *Kelima*, mengadakan penelitian kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, atau sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dari pendidikan. Dalam rangka menganalisa kebutuhan masyarakat luas perlu dilihat dari hal-hal sebagai berikut; apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, dan bagaimana pendapat masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat tentang isu-isu yang sedang ramai dibicarakan.

Upaya menarik minat masyarakat diantaranya adalah masyarakat belum mengetahui dengan pasti seperti apa sistem pendidikan, kualitas dan prospek dari

³⁸Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 23

madrasah. Masalah ini diperparah dengan terjadinya persaingan yang semakin kompetitif dari sekolah-sekolah umum lainnya, yang terus memperbaiki kualitasnya, sehingga tidak jarang masyarakat hanya memandang sebelah mata pada madrasah. Dengan demikian analisis terhadap kelemahan, kekurangan, peluang, dan tantangan madrasah harus dilakukan oleh madrasah dalam rangka menilai dirinya sendiri, karena melalui hal tersebut, madrasah dapat mengukur kemampuannya guna pengembangan lebih lanjut, dimasa yang akan datang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

1. Faktor Pendukung

Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang peserta didik, kepala madrasah mengungkapkan bahwa dalam proses penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, khususnya seleksi penerimaan calon peserta didik baru lebih ditekankan pada aspek kemampuan baca tulis al-Qur'an, serta pengetahuan umum dan agama untuk menghasilkan peserta didik yang benar-benar berkualitas, disamping itu dalam penempatan peserta didik diseleksi dengan sistem pemerataan, sehingga proses meningkatkan kualitas pembelajaran lebih mudah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pengelolaan terhadap pendataan kemajuan belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, juga lebih diintensifkan serta penyimpanan data tentang peserta didik lebih rapi, dimana data peserta didik ini, sering kali dibutuhkan oleh madrasah dalam penentuan kebijakan madrasah. Dengan penyimpanan data yang lebih teratur, maka untuk mengakses pun lebih mudah yaitu dengan adanya sarana komputer yang dimiliki oleh madrasah, sehingga selain penyimpanan file dalam bentuk buku induk, juga dapat dilakukan dalam bentuk *file* komputer.³⁹

Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, wakil kepala madrasah bidang kurikulum mengungkapkan bahwa kurikulum yang diterapkan memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu saat ini masih menggunakan KTSP dengan melibatkan seluruh warga madrasah dalam penyusunannya, memiliki kalender pendidikan yang berisi pengaturan waktu sebagai acuan kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun ajaran, sehingga terlihat jumlah minggu efektif, hari efektif dan perkiraan libur, pembagian beban mengajar berdasarkan pada banyaknya guru, dan jumlah jam mengajar guru, perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam pedoman kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan evaluasi secara teratur, dan terjadwal dengan baik, serta proses evaluasi yang secara rutin dilakukan, pada setiap kegiatan pembelajaran maupun pada saat tengah semester dan akhir semester, memiliki peraturan akademik berisi peraturan umum, dan peraturan khusus seperti upacara bendera, kedatangan dan persiapan belajar

³⁹Misnawati Jusuf. Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, *Wawancara*, Gorontalo: Selasa, 18 Juli 2017

peserta didik di sekolah, waktu istirahat, tidak masuk sekolah atau izin, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, tata cara berpakaian, dan sanksi-sanksi.⁴⁰

Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, kepala madrasah mengungkapkan bahwa faktor yang mendukung pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan adalah Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge sebagai lembaga pendidikan Islam sangat mengutamakan penguasaan dan pengamalan agama bagi tenaga pengajar. Usaha-usaha yang dilakukan pihak madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran profesi tenaga kependidikan adalah dengan pemetaan dan meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan serta mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai pelatihan seperti studi banding, dan berbagai workshop untuk peningkatan kompetensi.⁴¹

Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang sarana dan prasarana, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana mengungkapkan bahwa faktor yang mendukung pengelolaan sarana prasarana di madrasah ini yaitu dalam segi pengadaan, karena sarana yang dibutuhkan sangat banyak dan tidak bisa semuanya langsung diberikan oleh pemerintah dananya, melengkapi sarana penunjang yang mungkin dapat meningkatkan peserta didik, selanjutnya mengawasi kebutuhan sarana dan prasarana mana yang harus didahulukan pengadaannya, serta penggunaan dan pemeliharannya ditingkatkan oleh warga madrasah yang juga ikut memiliki sarana dan prasarana yang ada.⁴² Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan, kepala madrasah mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan, yaitu penyusunan RKAS melibatkan pihak terkait yang terdiri dari wakil kepala madrasah, bendahara, pegawai tata usaha dan beberapa orang guru, serta komite madrasah, sumber dana dari uang pembayaran SPP peserta didik, dana BOS, dan PRODIRA. Adapun proses merealisasikan dana dan/atau pembiayaan pendidikan tersebut, telah sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, melakukan pertanggungjawaban keuangan, dan melakukan evaluasi anggaran, dengan mengikutsertakan dewan guru, komite dan ketua yayasan.⁴³ Ditinjau dari faktor pendukung pengelolaan bidang humas dan kemitraan, wakil kepala madrasah bidang humas mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah dipengaruhi faktor dukungan masyarakat yang cukup tinggi, kerjasama yang baik dengan berbagai instansi, transparansi yayasan dan kepala madrasah, dalam membuat berbagai kebijakan.⁴⁴

⁴⁰Lusiana Bakari. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge Bidang Kurikulum, *Wawancara*, Gorontalo: Selasa, 11 Juli 2017

⁴¹Misnawati Jusuf. Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, *Wawancara*, Gorontalo: Selasa, 18 Juli 2017

⁴²Asna Abdulah. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge Bidang Sarana dan Prasarana, *Wawancara*, Gorontalo: Rabu, 19 Juli 2017

⁴³Misnawati Jusuf. Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, *Wawancara*, Gorontalo: Selasa, 18 Juli 2017

⁴⁴Muhamad Adam, S.Pd. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge Bidang Humas, *Wawancara*, Gorontalo: Selasa, 25 Juli 2017

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan berbagai faktor pendukung yang ditemukan mempermudah proses implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge di atas, disisi lain juga ditemukan berbagai faktor penghambatnya dalam implementasinya di madrasah. Dari hasil observasi dan wawancara penulis, di lapangan menunjukkan bahwa implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge ada beberapa faktor yang menghambat dalam implementasinya. Berdasarkan temuan hasil penelitian terkait dengan faktor penghambat proses implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge, diperoleh temuan bahwa secara garis besar yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut. *Pertama*, aktor penghambat pengelolaan bidang kesiswaan yaitu: adanya seleksi masuk bagi calon peserta didik yang berupa tes mengenai kemampuan dalam baca tulis al-Qur'an, administrasi kesiswaan yang belum teratur, rendahnya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan di madrasah, dari segi layanan bimbingan dan konseling, tidak terdapatnya guru bimbingan dan konseling, belum ada program secara lebih spesifik terhadap pelacakan alumni, dan layanan ketatausahaan yang belum representatif. *Kedua*, faktor penghambat pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yaitu: sistem aturannya selalu berubah, jumlah beban jam pelajaran terlalu banyak, materi pelajarannya kurang spesifik, dan penjurusan nanti dilaksanakan di kelas XI, guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya

Ketiga, faktor penghambat pengelolaan bidang pendidik dan tenaga yaitu: statusnya kepegawaian guru sebagian masih honorer, kurangnya prestasi guru di bidang akademik maupun non akademik, kualifikasi pendidikan guru yang beragam, mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, rekrutmen guru dan pegawai tergantung dari kebijakan dan regulasi pemerintah, penyusunan dan supervisi program madrasah belum optimal, rendahnya kesejahteraan untuk guru dan tenaga kependidikan, rendahnya etos kerja, inovasi dan kreativitas, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas. *Keempat*, faktor penghambat pengelolaan bidang sarana dan prasarana yaitu: kurangnya dana yang tersedia, kurangnya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki karena terbatasnya ketenagaan yang mengelolanya, belum terpenuhi secara lengkap buku bacaan di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik, sarana prasarana penunjang dalam memenuhi standar pengelolaan pendidikan belum dapat dipenuhi secara maksimal seperti ruang perpustakaan yang memadai, ruang layanan bimbingan dan konseling, ruang osis dan fasilitas pendukung lainnya.

Kelima, faktor penghambat pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan yaitu: perencanaan keuangan yang kurang matang, kebijakan pemerintah dan yayasan, proses atau alur pencairan dana yang tidak mudah, adanya program pendidikan gratis, kurangnya dukungan dari orang tua. *Keenam*, faktor penghambat pengelolaan bidang budaya dan lingkungan madrasah yaitu: kurangnya kesadaran

warga madrasah membudayakan kebersihan dan merawat sarana dan prasarana yang ada, penegakan ketertiban dan kedisiplinan yang belum optimal, latar belakang keluarga peserta didik. *Ketujuh*, faktor penghambat pengelolaan bidang humas dan kemitraan yaitu: program kerja humas lebih fokus terhadap program-program meningkatkan kualitas pembelajaran masyarakat internal, sedangkan dengan masyarakat eksternal tidak begitu diperhatikan, organisasi humas tidak masif karena struktur kepengurusan humas hanya diduduki oleh wakil kepala madrasah bidang humas dan tidak mempunyai staf lain, pengetahuan orang tua tentang madrasah kurang dari segi kondisi madrasah serta proses pembelajarannya, terbatasnya tenaga guru dan staf serta sumber daya finansial yang dimiliki setiap madrasah mengakibatkan minimnya kegiatan humas yang dilaksanakan.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa komponen pengelolaan yang belum terlaksana sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan seperti pada pengelolaan bidang kesiswaan untuk aspek bimbingan dan konseling, pada pengelolaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dalam pengelolaan bidang sarana dan prasarana yang terlaksana hanya penyusunan program sarana dan prasarana. Pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan yang terlaksana adalah aspek penyusunan pedoman pengelolaan pembiayaan dan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan pertanggung jawaban pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan telah dilakukan berdasarkan anggaran yang ada. Pengelolaan bidang budaya dan lingkungan yang terlaksana adalah penyusunan tata tertib, kode etik, serta program kesadaran beretika di madrasah. Sementara pengelolaan bidang humas dan kemitraan lebih difokuskan pada kerjasama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan madrasah melalui kerjasama dengan bimbingan belajar, aspek lingkungan, aspek meningkatkan kualitas pembelajaran karakter, aspek pengelolaan sarana dan prasarana, melalui kerjasama dengan rekanan maupun instansi yang memberikan layanan pengadaan jasa, serta melibatkan masyarakat pada beberapa kegiatan madrasah

Kedua, tahapan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge sebagai berikut (1) perencanaan pembelajaran; bentuk perencanaan yang dipersiapkan atau disusun oleh guru adalah membuat silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kartu soal, kartu jawaban, dan daftar penilaian. (2) Pelaksanaan pembelajaran yakni tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran oleh guru yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai dengan silabus dan RPP. (3) Evaluasi pembelajaran yakni Penilaian hasil belajar peserta didik: Madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan, Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan. Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik. Madrasah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi

sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan. Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan.

Ketiga, faktor pendukung proses implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Madrasah Aliyah Sabrun Jamil Botupingge adalah: memiliki prestasi akademik dan non akademik, memiliki program pembelajaran yang terencana, kepemimpinan madrasah, adanya pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, adanya kemandirian atau kewenangan dalam mengelola madrasah, dan partisipasi yang tinggi dari warga madrasah dan masyarakat sekitar. Sementara faktor penghambatnya adalah: administrasi kesiswaan yang belum teratur, rendahnya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, layanan ketatausahaan yang belum representatif, perencanaan keuangan yang kurang matang, kebijakan pemerintah dan yayasan, proses atau alur pencairan dana yang tidak mudah, dan adanya program pendidikan gratis.

Rekomendasi

Berdasar keseluruhan kesimpulan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut. *Pertama*, pengelolaan bidang kesiswaan, peserta didik pada tingkat madrasah aliyah memiliki kekhususan, dimana mereka datang dari kelompok menengah ke bawah pada tingkat sosial ekonomi, dan isu tingkat kemampuan yang di bawah sekolah umum. Akan tetapi bukan berarti proses layanan kesiswaan menjadi berbeda, pada intinya harus sama dengan sekolah lainnya sehingga kualitas pembelajaran akan menjadi lebih baik. *Kedua*, pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang perlu diperhatikan secara umum, adalah pengelolaan kurikulum madrasah memiliki kekhasan dengan pendidikan keislamannya, akan tetapi perlu dipikirkan bagaimana mensejajarkan kurikulum yang menjadi pedoman bagi seluruh sekolah, dalam kelompok sekolah umum, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. *Ketiga*, pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada maka guru yang bersangkutan harus memiliki latar belakang yang sesuai, dengan bidang studi yang diampunya. *Keempat*, Pengelolaan bidang sarana dan prasarana harus memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan. *Kelima*, pengelolaan bidang pembiayaan, aktivitas-aktivitas pemicu biaya pendidikan pada tingkat madrasah harus dapat teridentifikasi dengan baik. *Keenam*, pengelolaan bidang budaya dan lingkungan madrasah hendaknya meningkatkan peran seluruh warga madrasah. *Ketujuh*, pengelolaan bidang humas dan kemitraan, terus berupaya mengadakan kerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat, seperti bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh dan pejabat pemerintahan demi terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran.

Daftar Pustaka

Abdul, Rahmat. *Manajemen Pendidikan Islam*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2013.

- Agus, Zainul Fitri. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif-Filosofis Ke Praktis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Asmani, Jamal Ma'Mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Badrudin. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks, 2014.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1996.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.
- Fathurrohman, Jajang. *Manajemen Strategik Pengelolaan Madrasah Diniyah Masjid al-Fatah Sleman Yogyakarta*. Tesis, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: RosdaKarya, 2007.
- George R. Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: BumiAksara, 2003.
- Hardar Putra Daulay, *Historis Dan Eksistensi Pesantren Sekolah Dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Hidayat, Ara & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Jamaluddin. *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- James P. Spradley, *Participation Observation*. New York: Holt, Rinerhart and Winston, 1990.
- Mulyasa, Dedi. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: RemajaRosdakarya, 2012.
- Nurhattati, Fuad. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat (Konsep dan Strategi Implementasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007.
- Qodry, Azizy. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu, 2002.
- Rusman. *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.
-